

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB), INFLASI, DAN JUMLAH PENDUDUK,
TERHADAP KEBIJAKAN PENGELUARAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2012-2014**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

OLEH:

**AFRIANA WULANDARI
13810122**

PEMBIMBING:

**SUNARSIH, SE, M.Si
NIP: 19740911 199903 2 001**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Sistem pemerintahan sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menganut asas desentralisasi yang diwujudkan dengan otonomi daerah telah memberikan kewenangan penuh kepada daerah otonom untuk mengelola keuangan daerah masing-masing baik pendapatan maupun pengeluaran. sebagai pertanggungjawaban pemerintah otonom untuk menciptakan tatanan yang lebih baik dalam skema *good governance*. Salah satunya dengan cara mengelola keuangan belanja daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk terhadap kebijakan pengeluaran belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2012-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan alat analisis *fixed effect model*. Objek dari penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2012 hingga tahun 2014, variabel PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kebijakan pengeluaran belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 99,7%. Artinya bahwa variabel independen (PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk) mampu menjelaskan variabel dependen (Belanja Daerah) sebesar 99,7% sedangkan 0,3% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

Kata Kunci: *Belanja Daerah, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk*

ABSTRACT

Government system which appropriate with law number 22 of 1999th follow decentralization principle is embodied with autonomy district has given full authority to autonomy district manage each district finance. It like income or outlay. It is the autonomy government responsibility to create better arrangement in *good governance* scheme. One way to reach it is managing the finance spending district.

The purpose of this research is to analyse PDRB influence, inflation, and total population concern with policy of finance spending district central java province period 2012-2014. This research use secondary data that is acquired from central corporation central java statistics. The method that is used in this research is panel data regression with *sfixed effect model* analysis. The object in this research is 35 regencies in central java province.

The result of this research show that in period 2012 to 2014, PDRB, inflation, and total population give significant and positive influence to policy of finance spending district in central java province. The coefficient of determination that is acquired is 99,7 %. It means that independent variable (PDRB, inflation and total population) capable to explain dependent variable (district expenditure) 99,7% whereas 0,3% is explained by variable out of the model

Key words: *district expenditure, PDRB, inflation, total population*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Afriana Wulandari

Kepada

**Yth. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afriana Wulandari
NIM : 13810122
Judul Skripsi : **"Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Dan Jumlah Penduduk, Terhadap Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2014"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Jumadil Ula 1438 H
6 Januari 2017 M

Pembimbing

SUNARSIH, SE, M.Si
NIP: 19740911 199903 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B-362/Un.02/DEB/PP.05.4/02/2017

Skrripsi dengan judul

**: ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB), INFLASI, DAN
JUMLAH PENDUDUK, TERHADAP
KEBIJAKAN PENGELUARAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012-2014**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Afriana Wulandari

NIM : 138100122

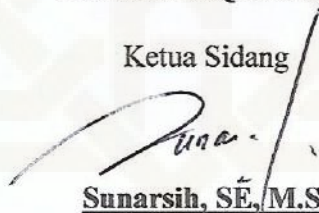
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 31 Januari 2017

Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

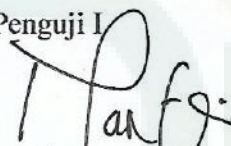
Ketua Sidang



Sunarsih, S.E., M.Si

NIP: 19740911 199903 2 001

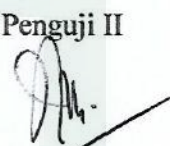
Penguji I



Sunaryati, S.E., M.Si

NIP. 19751111 200212 2 002

Penguji II



Drs. Slamet Khilmi, M.Si

NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 7 Febuari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afriana Wulandari
NIM : 13810122
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah / Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Dan Jumlah Penduduk, Terhadap Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2014” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan dipergunakan sebagaimana perlunya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

Yogyakarta, 9 Januari 2017

Penyusun



Afriana Wulandari
NIM. 13810122

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afriana Wulandari
NIM : 13810122
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

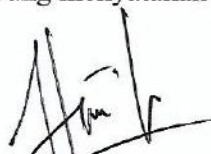
“ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), INFLASI, DAN JUMLAH PENDUDUK, TERHADAP KEBIJAKAN PENGELUARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012-2014”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 9 Januari 2017

Yang menyatakan



(Afriana Wulandari)

MOTTO

KHIYAR MIN KHIYARIN

“Berusaha menjadi yang terbaik dari yang terbaik”

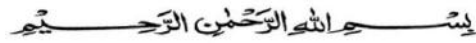


HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan dan penyusunan Skripsi saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua yang telah merawat dan mendidik saya dari lahir sampai saat ini serta memberikan nafkah yang selama ini mereka berikan sehingga saya dapat tumbuh dan berkarya seperti sekarang ini*
- 2. Adik yang selalu memberi dukungan moril maupun materil*
- 3. Teman, sahabat, dan orang-orang yang selalu mendukung dan mencintai saya*
- 4. Seluruh keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mulai dari staff karyawan, dosen, hingga teman mahasiswa tempat menimba ilmu disegala pengetahuan tentang ekonomi syari'ah*
- 5. Semua pihak yang telah mendukung saya dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Skripsi*

KATA PENGANTAR



Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur Penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada Penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tak lupa Penyusun haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafa’atnya di *yaumul qiyamāh* nanti. Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, dengan mengucap syukur akhirnya skripsi atau tugas akhir ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Untuk itu, Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Sunaryati, SE.,M.Si., selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Sunarsih, SE, M. Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk Penyusun selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh pegawai dan staf TU Prodi, Jurusan, dan Fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Orang tua tercinta, Bapak Slamet Muhtar dan Ibu Winarti, adik M Widi Santoso dan juga seluruh keluarga besar atas segala do'a, dukungan, kasih sayang dan motivasinya.
8. Teman seperjuangan kuliah (Nia, Sita, dan Wahyu) yang telah banyak membantu penulis.
9. Keluarga KKN 90 (Mas Tama, Ibi, Aufar, Asep, Jalil, Desi, Deasy, Erwin, dan Ika) Dusun Pacar1 Girisuko Panggang. Terimakasih telah menjadi keluarga baru yg berkesan.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah berjuang bersama-sama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta semua yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Mas Soleh dan Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan tugas ahir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Aamiin.

Yogyakarta, 9 Januari 2017

Penyusun,



Afriana Wulandari
NIM. 13810122

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

عَلَّة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-aulyā'

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fatḥah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	żukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	ditulis	Ā
جاهليَّة	ditulis	jāhiliyyah
2. fatḥah + yā' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	tansā
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
كَرِيم	ditulis	karīm
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
فُرُوض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.4 Sistematika Pembahasan	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengeluaran Belanja Daerah	14
2.1.1 Pengeluaran Pemerintah	14
2.1.2 Belanja Daerah	19
2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	20
2.2.1 Produk Domestik dan Regional	21
2.2.2 Metode Perhitungan PDRB	21
2.3 Inflasi	22
2.4 Penduduk	28
2.4.1 Pengertian Penduduk	28
2.4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	31
2.5 Pengeluaran Belanja Daerah dalam Prespektif Islam	33
2.6 Inflasi dalam Prespektif Islam	38
2.7 Kependudukan dalam Prespektif Islam	42
2.8 Telaah Pustaka	43
2.9 Kerangka Pemikiran	46
2.10 Hipotesis	47
2.10.1 Pengaruh PDRB dengan Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah	48
2.10.2 Pengaruh Inflasi dengan Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah	49
2.10.3 Pengaruh Jumlah Penduduk dengan Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	52
3.2 Populasi dan Sampel	52
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	53
3.3.1 Pengeluaran Belanja Daerah	53
3.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	54
3.3.3 Inflasi	55
3.3.4 Jumlah Penduduk	56
3.4 Data dan Sumber Data.....	56
3.5 Metode Pengumpulan Data	57
3.6 Metode Analisis	57
3.6.1 Pendekatan <i>Common Effect Model</i>	59
3.6.2 Pendekatan <i>Fixed Effect Model</i>	59
3.6.3 Pendekatan <i>Random Effect Model</i>	60
3.7 Teknik Analisis Data	60
3.7.1 Uji Spesifikasi Model	61
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	62
3.7.3 Pengujian Hipotesis	64
3.7.3.1 Uji F	64
3.7.3.2 Uji t	66
3.7.3.3 Koefisien Determinasi R^2	65

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	67
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	68
4.3 Regresi Data Panel	69
4.3.1 Uji Chow-test atau Likelihood Ratio-test.....	70
4.3.2 Uji Hausman test	70
4.4 Uji Asumsi Klasik	71
4.5 Pengujian Hipotesis	75
4.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	75
4.5.2 Koefisien Determinasi	76
4.5.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)	76
4.6 Pembahasan	77
4.6.1 Pengaruh PDRB Terhadap Pengeluaran Belanja Daerah	77
4.6.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Pengeluaran Belanja Daerah	81
4.6.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Belanja Daerah	87

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Keterbatasan	92
5.3 Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA	94
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2012-2014 (Ribuan Rupiah).....	04
Tabel 1.2 Inflasi Jawa Tengah dan Enam Kota di Jawa Tengah, 2010- 2014 (dalam persen)	07
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	68
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Chow-test</i> atau <i>Likelihood Ratio-test</i>	70
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman test	70
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	71
Tabel 4.5 Hasil Regresi Panel <i>Fixed Effect Unweighted</i>	72
Tabel 4.6 Hasil Perbandingan <i>Fixed Effect unweighted</i> dengan <i>Fixed Effect weighted</i>	72
Tabel 4.7 Hasil Uji Park Regresi Fungsi Residual.....	73
Tabel 4.8 Hasil Hasil Regresi Panel <i>Fixed Effect Weighted</i>	73
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F.....	75
Tabel 4.10 Hasil R^2 dan Adjusted R^2	76
Tabel 4.11 Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Penelitian	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (Miliar Rupiah).....	06
Gambar 1.2	Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2012-2014.....	08
Gambar 2.1	<i>Inflationary Gap</i>	24



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan telah mengalami beberapa kali perkembangan. Saat ini sistem pemerintahan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Purnomo, 2010:14), dimana pemerintahannya telah menganut asas desentralisasi.

Sistem Pemerintahan yang menganut asas desentralisasi memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Bentuk penyelenggaraan ini meliputi Kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dalam segala bidang, yaitu otonomi yang bertanggung jawab dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban sekaligus konsekuensi pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah.

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam hal ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat sebagai salah satu pihak dan pemerintah daerah sebagai pihak lainnya, yang secara legal konstitusional tetap

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang ahir-ahir ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal. Harapan tersebut muncul oleh karena kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan suatu tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema *good governance* dengan segala prinsip dasarnya.

Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk penyelenggaraan otonominya (Purnomo, 2010; 16). Otonomi daerah harus diarahkan pada keberhasilan dengan dukungan pendanaan yang memadai melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan keuangan daerah, selain bertujuan untuk meningkatkan pembangunan juga ditujukan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Rendahnya kemampuan keuangan akan menimbulkan rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat, atau bahkan dapat mengalihkan sebagian fungsi-fungsi pemerintah daerah kepada

tingkat pemerintah yang lebih tinggi sebagai akibat dari anggapan bahwa pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsinya tersebut dengan baik.

Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 adalah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat, lembaga ekonomi, politik, hukum, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI. Di sisi lain kemampuan keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam rangka desentralisasi kepada setiap daerah dituntut untuk dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2001; 8).

Hal tersebut dapat dilihat dari Propinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 Daerah Tingkat II yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota dimana setiap daerah memiliki penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintahan berbeda-beda, yaitu setiap pengeluaran pemerintah dilakukan berdasarkan kepemilikan pendapatan yang berupa penerimaan dari potensi-potensi daerah, atau yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan dan pengeluaran daerah disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah. Tujuan dan fungsi APBD pada prinsipnya, sama dengan tujuan dan fungsi APBN. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu daerah, perekonomian suatu daerah akan baik apabila ketiganya diolah dengan baik pula.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa. Sedangkan Belanja Langsung meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, Belanja Modal. (Gorahe dkk, 2013;2). Berikut ini merupakan realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2012-2014 (Ribuan Rupiah)

URAIAN	TAHUN		
	2012	2013	2014
Belanja Tidak Langsung	26.919.437.914	30.464.635.169	20.902.183.198
Belanja Langsung	14.139.910.411	17.310.840.173	16.911.469.421
Total Belanja Daerah	41.059.348.325	47.775.475.342	37.813.652.619

Sumber: BPS DIY Statistik Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selama periode 2012 hingga 2014 jumlah belanja daerah kabupaten dan kota Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2012 menuju 2013 belanja daerah

mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun anggaran 2014 alokasi belanja tidak langsung mendominasi anggaran belanja (BI Wilayah V (Jateng-DIY), 2014:41).

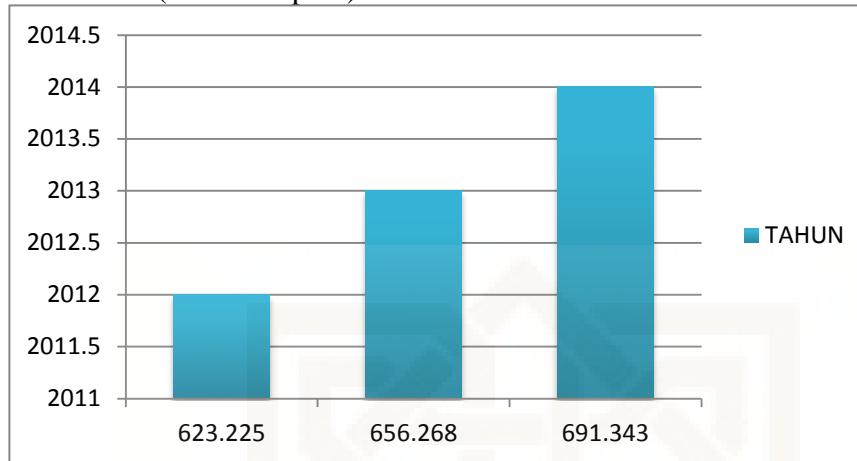
Pada triwulan 2014 laporan alokasi Belanja Tidak Langsung mencapai 78,94% sementara Belanja Langsung 21,06%. Pada triwulan ini terjadi peningkatan realisasi alokasi Belanja Tidak Langsung baik terhadap anggaran tahun 2014 sendiri maupun terhadap data historis 2012-2013 yang rata-ratanya hanya mencapai 72,39%. Sementara itu pada realisasi Belanja Langsung, alokasi pada triwulan 2014 lebih rendah dari rata-rata realisasi alokasi anggaran 2012-2014 sebesar 27,61%. Apabila ditinjau lebih mendalam pada alokasi Belanja Tidak Langsung mayoritas berupa Belanja Hibah yang mencapai hingga 46,07% diikuti Belanja Bagi Hasil Kab/Kota sebesar 30,62%, dan Belanja Pegawai 23,13%. Sementara itu alokasi belanja langsung didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar 65,24%, kemudian Belanja Modal 21,76%, dan Belanja Pegawai 13,00% (BI Wilayah V (Jateng-DIY, 2014:41).

Menurut teori konsumsi yang dikemukakan Keynes terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, diantaranya adalah: pertama, tingkat pendapatan dan kekayaan masyarakat. Kedua, Budaya, gaya hidup, dan selera konsumen. Ketiga, harga barang dan jasa. Keempat, tingkat pendidikan. Kelima, jumlah penduduk dan yang terahir lingkungan dan media. Teori konsumsi Keynes terkenal dengan teori konsumsi yang memiliki hipotesis pendapatan absolut (*Absolute Income Hypotesis*) yang pada intinya menjelaskan bahwa konsumsi seseorang dan atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah region dalam jangka waktu tertentu. Untuk meningkatkan belanja daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harus besar. Karena semakin besar PDRB, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten/kota dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut sebagai kepentingan pelayanan publik. (Lin dan Lun 2000 dalam Gorahe dkk, 2013:3).

Selain itu PDRB merupakan data yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan adanya data tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan tingkat kemakmuran penduduk. PDRB juga dapat digunakan oleh para pengambil keputusan (pemerintah) sebagai bahan perencanaan, analisis, dan evaluasi yang bermanfaat untuk menentukan sasaran pembangunan sebelum menentukan kebijakan. Kondisi perekonomian Jawa Tengah menunjukkan tanda pemulihan, hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Salah satunya dapat digambarkan melalui Nilai PDRB atas harga konstan 2010.

Grafik 1.1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka, diolah

Seperti yang terlihat pada grafik 1.1 di atas bahwa perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atas harga konstan 2010 pada Tahunan 2012-2014 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2012 pendapatan seluruh PDRB Se Provinsi Jawa Tengah sebesar 623.225 miliar rupiah yang selanjutnya mengalami peningkatan stabil pada tahun tahun berikutnya sampai dengan tahun 2014. Peningkatan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2014 dimana pada tahun sebelumnya 656.268 miliar rupiah menjadi 691.343 miliar rupiah.

Inflasi merupakan salah satu variabel ekonomi makro paling penting dan paling ditakuti oleh para pelaku ekonomi termasuk Pemerintah, karena dapat membawa pengaruh buruk pada struktur biaya produksi dan tingkat kesejahteraan. Dampak yang sangat luas diantaranya ketidakstabilan dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi inflasi suatu daerah maka akan berakibat pada penurunan tingkat pendapatan daerah tersebut dan akan menimbulkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pengalaman beberapa negara yang pernah mengalami hiperinflasi menunjukkan bahwa inflasi

yang buruk akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, dan tidak mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006: 176). Hal inilah yang mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan pengeluaran dengan tujuan menekan laju inflasi. Berikut merupakan inflasi Jawa Tengah dan enam kota di Jawa Tengah.

Tabel 1.2 Inflasi Jawa Tengah dan Enam Kota di Jawa Tengah, 2010-2014
(dalam persen)

URAIAN	TAHUN		
	2012	2013	2014
Semarang	4,85	8,19	8,53
Surakarta	2,87	8,32	8,01
Purwokerto	4,73	8,50	7,09
Tegal	3,09	5,80	7,40
Cilacap	6,87	8,37	8,19
Kudas	4,77	8,31	8,59
Jawa Tengah	4,24	7,98	8,23

Sumber: BPS Jawa tengah Dalam Angka, diolah

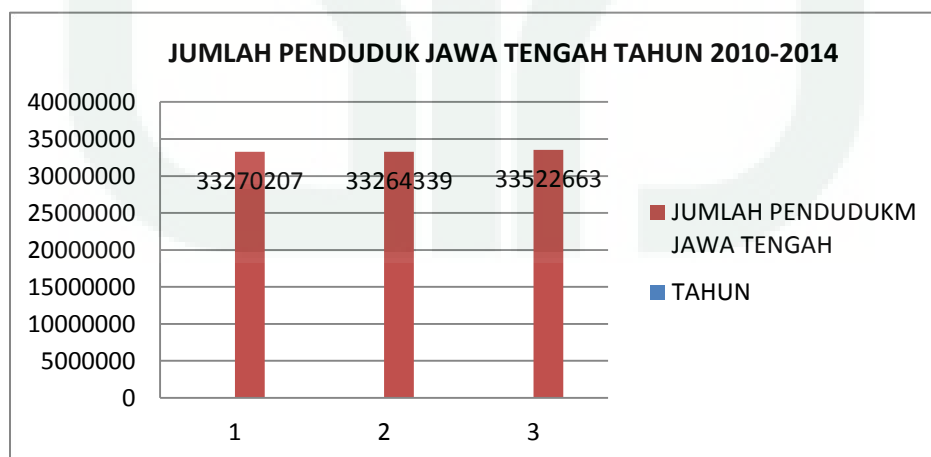
Dari data tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa dari kurun waktu tahun 2012-2014, Jawa Tengah mengalami peningkatan Inflasi yang cukup besar. Inflasi mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2013 sebesar 7,98% dibandingkan tahun sebelumnya 2012 sebesar 4,25%. Akan tetapi inflasi tahun kalender di tahun 2014 jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yaitu 8,23%.

Dalam penentuan kebijakan pemerintah, jumlah penduduk merupakan salah faktor yang mempengaruhi pengeluaran belanja daerah. Karena meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar bagi

pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Dipandang sebagai aset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar maka anggaran yang diperlukan akan semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan (Gorahe *et al*, 2013; 3). Jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap pemerataan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Di bawah ini merupakan jumlah penduduk Jawa Tengah.

Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2012-2014



Sumber: BPS Jawa Tengah, Dalam Angka

Dari grafik 1.2 di atas diketahui bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun pada periode 2012 sampai dengan 2014. Dimana jumlah penduduk terakhir pada tahun 2014 mencapai 33.522.663 jiwa.

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk terhadap kebijakan pengeluaran belanja daerah kota/abupaten di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2012-2014. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun dengan alasan terjadi fluktuasi pengeluaran belanja daerah dimana pada tahun 2013 belanja daerah mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2014 belanja daerah mengalami penurunan secara signifikan. Penelitian sebelumnya untuk beberapa daerah di Indonesia telah menyatakan pendapat dengan dua versi bahwa jumlah penduduk mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah sedangkan pada versi lain jumlah penduduk mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian ini penting dilakukan karena Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terpadat ketiga di Indonesia. Jumlah penduduk terpadat Jawa Tengah berada di Semarang, dimana Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Sehingga jumlah penduduk akan menentukan dan mempengaruhi kebijakan pengeluaran belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memiliki pemikiran untuk melakukan penelitian pada kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan menambahkan variabel PDRB dan Inflasi pada penelitiannya. Dengan demikian, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **"ANALISIS PENGARUH PDRB, INFLASI, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP**

KEBIJAKAN PENGELUARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012-2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan masalah yang terkait dengan latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kebijakan pengeluaran belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2014?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap kebijakan pengeluaran belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2014?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kebijakan pengeluaran belanja pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2014?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh variabel PDRB terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2014.
2. Menganalisis pengaruh variabel inflasi terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2014.
3. Menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2014

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan tentang studi PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk. Selain itu dapat menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh serta sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Islam.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi instansi terkait sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang langkah yang diambil dalam menentukan kebijakan fiskal (keuangan) yang lebih berpengaruh
3. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam wacana kebijakan pengeluaran pemerintah dan diharapkan dapat ikut serta mengisi ruang yang masih cukup lebar bagi penelitian kebijakan pengeluaran dalam kasus pemerintah provinsi.
4. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi dan gambaran kepada pembaca mengenai seberapa besar variabel-fiskal dan non-fiskal, yaitu variabel PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk dalam menentukan besaran pengeluaran pemerintah tahun anggaran 2012-2014.

1.4 Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan titik tolak dan menjadi acuan dalam proses penelitian yang dilakukan. Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu latar belakang yang menguraikan isu dan beberapa fenomena kebijakan pengeluaran pemerintah dan fenomena kegiatan ekonomi. Selanjutnya rumusan masalah sebagai inti permasalahan

yang dicari penyelesaiannya melalui penelitian ini dan dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah penelitian.

Bab II landasan teori memuat tinjauan pustaka dan hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan guna mengetahui posisi penelitian. Pada bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab VI Penelitian dan Pembahasan, pada permulaan akan digambarkan secara singkat PDRB, inflasi, jumlah penduduk dan kebijakan pengeluaran pemerintah. Kemudian, bab ini dilanjutkan tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan dari pengolahan data. Hasil penelitian adalah jawaban atas seluruh pertanyaan penelitian yang telah disebutkan dalam BAB I.

Bab V Penutup, bab ini merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini terdapat saran serta masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini, yaitu saran atau implikasi kebijakan yang dapat diturunkan berdasarkan temuan utama penelitian.

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, didapatkan simpulan sebagai berikut:

- a) PDRB merupakan Variabel makroekonomi yang memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah, uang mana ketika PDRB mengalami kenaikan maka Belanja Daerah juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, jika PDRB mengalami penurunan, maka nilai Belanja Daerah juga akan turun. Hal ini dikarenakan PDRB merupakan salah satu faktor yang digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
- b) Variable inflasi merupakan variabel makroekonomi yang memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan inflasi ringan dapat memfasilitasi tujuan pembangunan ekonomi. Sesuai dengan Pandangan *deliberate inflation* berargumen bahwa sebuah kenaikan tingkat harga memberikan stimulus bagi segmen-segmen ekonomi yang relatif produktif, memberikan profit yang lebih untuk faktor-faktor yang lebih profit dan *mobile*.
- c) Jumlah penduduk merupakan variabel makroekonomi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan populasi adalah kunci dalam

memajukan kesejahteraan ekonomi. Selain itu semakin banyak jumlah penduduk akan semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat dan secara langsung akan meningkatkan jumlah anggaran belanja daerah sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat.

1.2. Keterbatasan

Pada penelitian ini ditemui beberapa keterbatasan diantaranya adalah

- a) Jumlah daerah penelitian yang hanya menggunakan satu daerah penelitian yaitu Jawa Tengah.
- b) Jumlah periode tahun hanya selama tiga tahun.
- c) Jumlah variable independen yang hanya tiga variable (PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk)
- d) Data yang seringkali tidak konsisten dalam penyajiannya, dimana dalam penyediaan data tidak jarang menunjukkan angka yang berbeda sehingga menyulitkan peneliti untuk mengambil data mana yang akan digunakan.

1.3. Saran

- a) Jumlah objek penelitian (daerah) sebaiknya diperbanyak agar dapat membandingkan satu daerah dengan daerah yang lain
- b) Periode penelitian sebaiknya diperbanyak agar dapat mengetahui pengaruh variable dalam kurun waktu yang lama.
- c) Variable independen agar diperbanyak agar mengetahui variabel lain yang berpengaruh terhadap belanja daerah.

- d) Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber PDRB baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan PDRB daerah
- e) Pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kestabilan inflasi ringan agar tidak terjadi hiper inflasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan melancarkan tujuan pembangunan ekonomi daerah



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, 2005, "Al-Qur'an dan Terjemahan (Edisi 2002)", Jakarta: Al Huda Gema Insani.

Buku

Abdul Halim, 2014, "Manajemen Keuangan Sektor Publik", Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Haris dan Nyoman Adika, 2002, "Dinamika Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia (dari prespektif makro ke realitas mikro)", Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).

Abdullah Abdul Husain at-Tariq, 2004, "Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan", Yogyakarta: Magister Insania Press.

Adiwarman A. Karim, 2001, "Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer", Jakarta: GemaInsani Press.

Adiwarman A. Karim, 2007, "Ekonomi Mikro Islam Edisi Keempat", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adiwarman Azwar Karim, 2010, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", Jakarta: Rajawali Pers.

Ahsan Askani, 2008, "Tafsir Ath-Thabari", Jakarta: Pustaka Azzam

Aulia Pohan, 2008, "Potensi Kebijakan Moneter Indonesia (Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mempengaruhi Perekonomian Indonesia)", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Azwar, 2005, "Metode Penelitian", Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

- Badan Pusat Statistik, 2012, “Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Jawa Tengah 2012”, Jawa Tengah: BPS Prov Jateng
- Badan Pusat Statistik, 2013, “Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Jawa Tengah 2013”, Jawa Tengah: BPS Prov Jateng
- Badan Pusat Statistik, 2014, “Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Jawa Tengah 2014”, Jawa Tengah: BPS Prov Jateng
- Badan Pusat Statistik, “2012, Jawa Tengah Dalam Angka 2012”, Jawa Tengah: BPS Prov Jateng dan BAPPEDA Prov. Jateng
- Badan Pusat Statistik, 2013, “Jawa Tengah Dalam Angka 2013”, Jawa Tengah: BPS Prov Jateng dan BAPPEDA Prov. Jateng
- Badan Pusat Statistik, 2014, “Jawa Tengah Dalam Angka 2014”, Jawa Tengah: BPS Prov Jateng dan BAPPEDA Prov. Jateng
- Badan Pusat Statistik, 2015, “Jawa Tengah Dalam Angka 2015”, Jawa Tengah: BPS Prov Jateng dan BAPPEDA Prov. Jateng
- Badan Pusat Statistik, 2015, “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2010-2014”, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2012, “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2010-2011”, Jakarta: PBS.
- Badan Pusat Statistik, 2013, “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2010-2011”, Jakarta: PBS.
- Badan Pusat Statistik, 2014, “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2012-2013”, Jakarta: PBS.
- Badan Pusat Statistik, 2015, “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2013-2014”, Jakarta: PBS.
- Badan Pusat Statistik, 2016, “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2015”, Jakarta: PBS.
- Bank Indonesia Wilayah V (Jateng-DIY), 2014, “Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa tengah Triwulan I Tahun 2014”, Semarang: BI
- Boediono. (2005), “Ekonomi Makro. Edisi 4 cetakan ke dua puluh satu”, Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Dr. M. Umer Chapra, 2000, “Islam dan Tantangan Ekonomi”, Jakarta: Gema Insani Press.

- Drs. Khaelany HD, S.H., 1996, "Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup", Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Drs. Sugiyono, 2013, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)", Bandung: Alfabeta, cv.
- Dr. Wing Wahyu Winarni, MAFIS., Akt., "Analisis Ekonometrika dan statistic dengan Eviews Edisi ke-3", Yogyakarta: STIM YKPN
- Endang Setyowati dkk. (2004), "Ekonomi Makro Pengantar", Yogyakarta: STIE Yogyakarta.
- Halim, K. 2001, "Kebijakan dan Implementasi Publik", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Faruq an-Nabahan, 2000, "Sistem Ekonomi Islam Piihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis", Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- M. Nur Rianto Al Arif, S.E., M.Si., 2010, "Teori Makroekonomi Islam (Konsep, Teori, dan Analisis)", Bandung: Alfabeta, cv.
- Mankiw, N. Gregory. 2006, "Makroekonomi, Edisi Keenam", Jakarta: Erlangga
- Prof. M. Abdul Mannan, MA., Ph D, 1997, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sadono Sukrino, 2006, "Ekonomi Pembangunan(Proses,Masalah, dan Dasar Kebijakan)", Jakarta: Kencana.
- Sarwoko. 2005, "Dasar-Dasar Ekonometrika", Yogyakarta : Andi.
- Supranto, 2005, "Teori Ekonomi Mikro", Jakarta: Salemba Empat
- Supardi, 2005, "Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis", Yogyakarta: UII Press, Cet. I.
- Widarjono, 2009, "Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya", Edisi Ketiga, Yogyakarta:Ekonisia.

Skripsi

- Arbie Gugus Wandira, 2013, "Pengaruh Pendapatan Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pengalokasian Belanja Modal", Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Fitria Wulandari dkk,2013, "Pengaruh PDRB, PAD, dan DAU Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasama Barat", Skripsi, Sumatera Barat: STIE Pasama.

- Kasyati, 2015, “Pengaruh DAU, DAK, PAD, dana bagi hasil, dan kemandirian fiskal terhadap pengalokasian anggaran belanja modal”, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Prasetyo Yuli Purnomo, 2010, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 2005-2007”, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rendy Yulian Bayu Prakoso, 2011, Pengaruh PAD, DAU, dan PDRB terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah). Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ridho Argi, 2011, “Analisis Belanja Daerah Dan Faktorfaktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009”, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Umdatul Husna, 2015, Pengaruh Pdrb, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kota Se Jawa Tengah, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro.

Jurnal

- Ahmad Mansur, 2013, “Kebijakan Moneter dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Prespektif Islam”, Jurnal, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Ahmad Syakir, 2015, “Inflasi dalam Pandangan Islam”, Jurnal, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ali Murtadho, 2013, “Konsep Fiskal Islam Dalam Prespektif Historis”, Jurnal Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Andri Devita dkk, 2014, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”, Jurnal, Jambi: Universitas Jambi.
- Anggatia Ariza, 2013, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Prespektif Islam”, Jurnal, Pontianak: IAIN Pontianak.
- Butler, A dkk, 2003, “Surprise Inflation, Growth, and Un employment”, Jurnal, EBSCO Publishing

- Hadi Sumarsono dkk, 2009, Delibrate Inflation pada Kebijakan Desentralisai Fiskal Jawa Timur dan Dampaknya bagi Pertumbuhan Daerah. Jurnal, Jawa Timur: Universitas Sebelas Maret.
- Irdha Anisyah Marsudi Gorahe dkk, 2013, “Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara”, Jurnal, Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi Manado
- Juliana Ruth Sumualdkk, 2016, “Pengaruh Realisasi Belanja Daerah dan Angkatan Kerja Terhadap Perkembangan PDRB Provisi Sulawesi Utara Tahun 2004-2013”, Jurnal, Manado: Universitas Sam Ratulang Manado.
- Narwati Bustamam, Msi. SE, 2004, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Riau (Tahun 1976-2000)”, Jurnal, Riau: UIR Pekanbaru.
- Tohap Parulian, 2010, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Error Correction Model (ECM)”, Jurnal, Medan: Universita

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

NO	Hlm	BAB	Terjemahan
1	34	II	Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ yang lebih dari keperluan”. (QS. Al-Baqarah, 2:219)
2	34	II	Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai berlebih-lebihan” (QS. Al- A’raf [7] 31).
3	34	II	Hemat dalam penghidupan (belanja) lebih baik daripada sebagian perdagangan” (HR Daaruthni, Ismaili, Thabraani dan Baihaqi dari Jabir).
4	39	II	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. At-Tubah: 60)
5	40	II	Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepadanya sebagian dari (akibat) perbuatannya, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar Ruum [30] 41)
6	40, 85	II, IV	Allah-lah Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kedhaliman dalam urusan darah dan harta”(HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).
7	41	II	Akan tetapi Allahlah yang menurunkan dan menaikkan harga” (HR. Ahmad dan ad-Darimi)
8	44	II	Sedikitnya keluarga adalah salah satu dari dua kemudahan. Sedangkan banyaknya keluarga adalah salah satu dari dua kefakiran. (HR. Al-Qudha’i dalam Musnad Al-Syhab)
9	85	IV	Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Alloh, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Alloh), maka Alloh akan melipat ganda pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Alloh maha menyempitkan dan melapangkan rizki dan kepada-NYA lah kamu dikembalikan (Al-Qur’an, 2:245)
10	88	IV	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

			khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Qs. an-Nisā : 9)
11	81	IV	Dialah yang yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu dibangkitkan (Al-Mulk : 15)

LAMPIRAN II

Peroide	Belanja Daerah	PDRB	INFLASI	Jumlah Penduduk
2012	1,792,586,829.00	79,702,237.61	6.87	1,679,864.00
2013	2,073,241,082.00	81,369,806.41	8.37	1,676,089.00
2014	2,148,333,135.00	83,775,740.98	8.19	1,685,573.00
2012	1,084,239,067.00	25,982,158.22	4.22	1,603,037.00
2013	1,127,381,976.00	27,772,165.06	8.50	1,605,579.00
2014	1,282,313,160.00	29,098,389.63	7.09	1,620,918.00
2012	1,111,145,362.00	12,138,445.34	4.09	877,489.00
2013	1,234,963,970.00	12,819,159.66	9.57	879,880.00
2014	1,448,721,187.00	13,554,296.77	9.08	889,214.00
2012	1,412,496,989.00	10,473,363.43	4.55	890,962.00
2013	1,634,459,492.00	11,024,783.01	8.35	889,921.00
2014	1,774,332,619.00	11,583,435.69	7.78	895,986.00
2012	1,412,496,989.00	13,707,057.24	4.64	1,181,678.00
2013	1,634,459,492.00	14,344,827.43	10.46	1,176,722.00
2014	1,774,332,619.00	15,176,441.62	7.36	1,181,006.00
2012	1,126,148,840.00	9,406,242.93	3.66	708,483.00
2013	1,258,565,587.00	9,886,889.95	7.14	705,483.00
2014	1,446,522,260.00	10,344,988.27	8.52	708,038.00
2012	986,536,914.00	9,935,905.32	3.84	771,447.00
2013	1,100,870,144.00	10,457,817.95	8.82	769,318.00
2014	1,351,537,496.00	10,892,939.11	8.44	773,280.00
2012	1,146,500,040.00	16,071,142.55	2.59	1,219,371.00
2013	1,511,728,567.00	17,083,608.71	8.34	1,221,681.00
2014	1,824,743,223.00	17,915,809.49	7.91	1,233,695.00
2012	1,269,226,813.00	15,369,974.36	3.45	953,317.00
2013	1,422,890,307.00	16,265,748.68	8.21	951,817.00
2014	1,624,300,906.00	17,085,661.59	7.45	957,857.00
2012	1,439,619,163.00	19,102,402.36	3.65	1,153,047.00
2013	1,628,484,890.00	20,299,990.92	7.92	1,148,994.00

2014	1,851,779,680.00	21,391,717.78	7.76	1,154,040.00
2012	1,196,839,261.00	18,342,247.26	4.22	848,718.00
2013	1,274,671,857.00	19,403,138.94	8.42	849,506.00
2014	1,466,936,242.00	20,423,511.80	7.93	856,937.00
2012	1,313,945,470.00	14,605,088.22	3.43	946,373.00
2013	1,510,810,153.00	15,305,297.58	8.60	942,377.00
2014	1,623,950,414.00	16,109,707.79	7.20	945,817.00
2012	1,173,205,689.00	18,189,076.66	3.29	838,762.00
2013	1,346,189,085.00	19,224,635.92	8.70	840,171.00
2014	1,657,433,618.00	20,208,968.35	7.38	848,255.00
2012	1,197,434,073.00	17,902,104.86	3.74	875,283.00
2013	1,378,179,098.00	19,102,981.59	7.55	871,989.00
2014	1,573,100,497.00	20,170,942.51	8.51	875,600.00
2012	1,203,540,602.00	13,842,047.14	4.48	1,339,127.00
2013	1,536,803,059.00	14,471,228.93	7.88	1,336,304.00
2014	1,622,788,061.00	15,053,762.36	8.03	1,343,960.00
2012	1,125,135,407.00	11,116,865.90	3.55	847,125.00
2013	1,385,468,126.00	11,712,504.85	7.94	844,444.00
2014	1,588,653,866.00	12,227,201.29	7.13	848,369.00
2012	962,437,435.00	9,277,163.23	4.28	608,548.00
2013	1,121,777,868.00	9,778,950.39	6.88	608,903.00
2014	1,332,831,682.00	10,282,184.04	7.59	614,087.00
2012	1,425,711,539.00	21,072,328.70	3.92	1,219,993.00
2013	1,775,344,932.00	22,314,753.78	7.57	1,218,016.00
2014	1,867,213,936.00	23,327,059.31	8.01	1,225,594.00
2012	1,152,274,704.00	57,441,810.51	4.77	807,005.00
2013	1,294,479,726.00	60,042,549.60	8.31	810,810.00
2014	1,677,595,795.00	62,603,070.44	8.59	821,136.00
2012	1,297,076,712.00	14,824,995.87	4.52	1,144,916.00
2013	1,351,036,224.00	15,602,868.53	7.95	1,153,213.00
2014	1,604,163,565.00	16,326,957.62	9.87	1,170,797.00
2012	1,208,566,952.00	12,823,227.04	4.10	1,091,379.00
2013	1,312,466,842.00	13,499,226.47	8.22	1,094,472.00
2014	1,425,444,487.00	14,075,691.75	8.69	1,106,328.00
2012	1,215,522,162.00	24,306,718.35	4.56	968,383.00
2013	1,137,175,496.00	25,976,021.08	8.11	974,092.00
2014	1,251,301,386.00	27,534,876.57	8.63	897,557.00
2012	956,324,160.00	10,740,983.02	4.73	730,720.00
2013	1,102,506,970.00	11,400,498.28	7.01	731,911.00
2014	1,181,308,662.00	11,987,831.59	7.81	738,915.00
2012	1,163,988,889.00	21,075,717.33	3.89	926,325.00
2013	1,383,805,479.00	22,324,823.54	6.90	926,812.00
2014	1,574,525,120.00	23,463,053.00	8.34	934,643.00

2012	900,165,857.00	10,488,456.63	3.83	728,578.00
2013	1,049,361,428.00	11,101,126.78	8.08	729,616.00
2014	1,129,820,340.00	11,690,342.11	7.66	736,397.00
2012	1,045,377,704.00	11,354,849.90	2.96	861,366.00
2013	1,220,443,212.00	12,034,805.89	8.18	861,082.00
2014	1,305,186,781.00	12,627,134.32	8.32	867,573.00
2012	1,196,452,995.00	12,477,235.25	4.04	1,285,024.00
2013	1,476,289,683.00	13,166,859.41	6.52	1,279,596.00
2014	1,534,096,900.00	13,893,576.37	7.38	1,284,236.00
2012	1,347,362,421.00	16,912,249.74	4.13	1,421,001.00
2013	1,475,011,215.00	18,053,605.08	7.79	1,415,009.00
2014	1,763,846,127.00	18,955,755.71	8.48	1,420,132.00
2012	1,440,489,256.00	22,482,262.67	4.61	1,770,480.00
2013	1,890,996,749.00	23,823,556.92	9.83	1,764,648.00
2014	2,009,700,632.00	25,091,713.29	6.20	1,773,379.00
2012	536,348,689.00	4,484,268.08	6.68	120,447.00
2013	617,027,848.00	4,755,269.18	7.79	119,935.00
2014	689,961,015.00	4,987,376.44	7.92	120,373.00
2012	1,145,170,897.00	24,123,781.59	2.87	509,576.00
2013	1,402,670,368.00	25,612,681.32	8.32	507,825.00
2014	1,514,431,877.00	26,056,249.55	8.01	510,077.00
2012	551,634,845.00	6,574,907.26	4.12	177,480.00
2013	655,343,918.00	6,986,909.99	7.67	178,594.00
2014	767,709,437.00	7,322,580.36	7.84	181,193.00
2012	2,053,368,035.00	91,282,029.07	4.85	1,629,924.00
2013	2,657,023,457.00	97,340,978.65	8.19	1,644,800.00
2014	2,910,150,160.00	102,501,385.64	8.53	1,672,999.00
2012	561,608,991.00	5,151,813.52	3.55	290,347.00
2013	656,974,553.00	5,456,187.06	7.40	290,870.00
2014	722,641,883.00	5,755,282.26	7.82	293,704.00
2012	586,687,295.00	5,151,813.52	3.09	244,632.00
2013	690,947,872.00	5,456,187.06	5.80	243,860.00
2014	708,507,792.00	5,755,282.26	7.40	244,998.00
Mean	1,343,787,946.01	20,690,060.31	6.70	952,068.66
Median	1,332,831,682.00	15,176,441.62	7.57	890,962.00
Max	2,910,150,160.00	102,501,385.64	10.46	1,773,379.00
Min	536,348,689.00	4,484,268.08	2.59	119,935.00
std.dev	405,858,279.11	19,566,507.49	2.01	405,567.15

LAMPIRAN III

STATISTIK DESKRIPTIF

	BD	PDRB	INF	JP
Mean	1.34E+09	20690060	6.703905	952068.7
Median	1.33E+09	15176442	7.570000	890962.0
Maximum	2.91E+09	1.03E+08	10.46000	1773379.
Minimum	5.36E+08	4484268.	2.590000	119935.0
Std. Dev.	4.06E+08	19566507	2.014070	405567.2
Skewness	0.611991	2.766387	-0.545743	-0.013740
Kurtosis	4.963701	10.19302	1.903791	2.789077
Jarque-Bera	23.42485	360.2859	10.46944	0.197942
Probability	0.000008	0.000000	0.005328	0.905769
Sum	1.41E+11	2.17E+09	703.9100	99967209
Sum Sq. Dev.	1.71E+19	3.98E+16	421.8739	1.71E+13
Observations	105	105	105	105

FIXED EFFECT

Dependent Variable: LOG(BD)
Method: Panel Least Squares
Date: 12/03/16 Time: 10:01
Sample: 2012 2014
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-38.42642	8.641480	-4.446740	0.0000
LOG(PDRB)	2.098430	0.208758	10.05198	0.0000
LOG(INF)	0.046625	0.025633	1.818929	0.0734
LOG(JP)	1.796957	0.636284	2.824145	0.0062

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.985317	Mean dependent var	20.97054
Adjusted R-squared	0.977208	S.D. dependent var	0.323029
S.E. of regression	0.048768	Akaike info criterion	-2.928960
Sum squared resid	0.159345	Schwarz criterion	-1.968479
Log likelihood	191.7704	Hannan-Quinn criter.	-2.539754
F-statistic	121.5145	Durbin-Watson stat	2.703029
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Likelihood / F Test (Chow-Test)

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	21.394325	(34,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	259.654855	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(BD)

Method: Panel Least Squares

Date: 12/03/16 Time: 10:08

Sample: 2012 2014

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.61270	0.355030	38.34242	0.0000
LOG(PDRB)	0.138923	0.028401	4.891435	0.0000
LOG(INF)	0.244567	0.038616	6.333283	0.0000
LOG(JP)	0.337528	0.030603	11.02934	0.0000
R-squared	0.825904	Mean dependent var	20.97054	
Adjusted R-squared	0.820733	S.D. dependent var	0.323029	
S.E. of regression	0.136770	Akaike info criterion	-1.103676	
Sum squared resid	1.889321	Schwarz criterion	-1.002572	
Log likelihood	61.94296	Hannan-Quinn criter.	-1.062706	
F-statistic	159.7130	Durbin-Watson stat	0.978425	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	103.941287	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(PDRB)	2.098430	0.218909	0.041658	0.0000
LOG(INF)	0.046625	0.246161	0.000439	0.0000
LOG(JP)	1.796957	0.286213	0.402566	0.0173

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(BD)

Method: Panel Least Squares

Date: 12/03/16 Time: 10:09

Sample: 2012 2014

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-38.42642	8.641480	-4.446740	0.0000
LOG(PDRB)	2.098430	0.208758	10.05198	0.0000
LOG(INF)	0.046625	0.025633	1.818929	0.0734
LOG(JP)	1.796957	0.636284	2.824145	0.0062

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.985317	Mean dependent var	20.97054
Adjusted R-squared	0.977208	S.D. dependent var	0.323029
S.E. of regression	0.048768	Akaike info criterion	-2.928960
Sum squared resid	0.159345	Schwarz criterion	-1.968479
Log likelihood	191.7704	Hannan-Quinn criter.	-2.539754
F-statistic	121.5145	Durbin-Watson stat	2.703029
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Multikolinieritas

	LOG(BD)	LOG(PDRB)	LOG(INF)	LOG(JP)
LOG(BD)	1.000000	0.750318	0.337978	0.834141

LOG(PDRB)	0.750318	1.000000	0.146225	0.683397
LOG(INF)	0.337978	0.146225	1.000000	0.048210
LOG(JP)	0.834141	0.683397	0.048210	1.000000

Penyembuhan heterokedastisitas

Dependent Variable: LOG(BD)
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 12/03/16 Time: 10:11
Sample: 2012 2014
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-38.02358	9.392132	-4.048450	0.0001
LOG(PDRB)	2.084937	0.111844	18.64150	0.0000
LOG(INF)	0.043835	0.013628	3.216504	0.0020
LOG(JP)	1.784205	0.748418	2.383969	0.0200
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.997160	Mean dependent var	35.00004	
Adjusted R-squared	0.995592	S.D. dependent var	22.05509	
S.E. of regression	0.048637	Sum squared resid	0.158490	
F-statistic	635.7990	Durbin-Watson stat	2.685132	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.985296	Mean dependent var	20.97054	
Sum squared resid	0.159575	Durbin-Watson stat	2.706326	

Hasil Perbandingan Kedua Model FE:

Parameter	FE <i>unweighted</i>	FE <i>weighted</i>
Prob t-statistic	PRDB 0.0000 INF 0.0734 JP 0.0062	0.0000 0.0020 0.0200
R-square	0.985296	0.995592
Prob(F-statistic)	0.000000	0.000000



Afriana Wulandari
Kalangan RT.3/RW.7 Blondo Mungkid
Magelang
087745563774
Email: Afrianawulandari94@gmail.com

CURRICULUM VITAE (CV)

A. BIOGRAFI

Nama : Afriana Wulandari
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 25 April 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat rumah : Kalangan RT.3/RW.7 Blondo Mungkid Magelang
Jawa Tengah, Kode Pos: 56512
Nomor telepon : 085877701175
Email : Afrianawulandari94@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2001–2007 : Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
(MIM) Blondo
2007–2010 : Pendidikan SMP Negeri 1 Mertoyudan
2010–2013 : Pendidikan SMK Negeri 1 Magelang
2013–sekarang : Pendidikan Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

CURRICULUM VITAE (CV)

A. Biodata Pribadi

Nama : Afriana Wulandari

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 25 April 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Kalangan RT.3/RW.7 Blondo
Mungkid Magelang Jawa
Tengah, Kode Pos: 56512

Alamat Tinggal : Kalangan RT.3/RW.7
Blondo Mungkid Magelang
Jawa Tengah, Kode Pos:
56512

Email : Afrianawulandari94@gmail.com

Nomor telepon : 085877701175



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	'Aisiyah Bustanul Atfal (ABA) Blondo	1999-2000
SD	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Blondo	2001-2007
SMP	SMP Negeri 1 Mertoyudan	2007-2010
SMA	SMK Negeri 1 Magelang	2010-2013
S1	Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-2017